

# ORGANISASI PEREMPUAN DAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN

**M. Zainal Anwar**

Alumni Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan.

## **Abstract**

*This paper would like to see how the women organizations have tried to build prosperity for women, especially women who live in the vil-lage. Interestingly, the women organization activists seek a way out of poverty by using their own ideas, perspectives and mindset, not guided by a uniform national policy. This means the ideas are built based on local emancipation where women live day-to- day. In the author's view, one way for women to achieve prosperity is to give them a chance to work. For women, the purpose of giving the opportunity to work not only to increase revenue but also to take care of a variety of social vulnerability, especially poverty and domestic violence. Women's access to work also means the opportunity to be involved in the socio - political relations more broadly. This means that women can contribute to the development of their neighbourhood because they no longer dwell in the domestic sphere, but have enough time to interact in the public sphere, especially through the involvement in an organization. By doing so, the involvement of women in the organization has a broad meaning, not just a mere social benefit. There is a transformation of social capital, in the form of involvement in the organization, into economic capital in the form of an opportunity to engage in economic activity. However, the effort to transform social capital into economic capital is not easy. There are still unfavourable views arguing that women capability is not commensurate with men which eventually limit women to access a livelihood. Therefore, it is necessary to find a perspective that places men and women in equal and fair positions, especially in acquiring, utilizing and developing assets and accesses to economic resources, social and political. It is time for the state to formulate public policies that put women as the main actors and not merely as objects or complementary policies. In*

*sum , this paper believes that by involving in an organization, women will have a greater opportunity to be involved in economic activities, which in turn can lead women to welfare gates .*

*Key Words : Women organization, village, prosperity and economic activities*

### **Intisari**

Tulisan ini ingin melihat bagaimana ikhtiar organisasi perempuan membangun kesejahteraan bagi kaum perempuan khususnya yang tinggal di desa. Menariknya, para aktivis organisasi perempuan mencari jalan keluar kemiskinan dengan ide yang dibimbing oleh cara pandang dan pola pikir para perempuan itu sendiri, bukan dipandu oleh sebuah kebijakan nasional yang menyeragamkan. Artinya, ide ini dibangun berdasar emansipasi lokal dimana kaum perempuan tinggal sehari-hari. Dalam pandangan penulis, salah satu cara bagi para perempuan untuk menggapai kesejahteraan adalah dengan memberi kesempatan untuk bekerja. Bagi kaum perempuan, tujuan memberi kesempatan untuk bekerja tidak hanya untuk menambah pendapatan tetapi juga untuk menjaganya dari berbagai kerentanan sosial terutama kemiskinan maupun kekerasan dalam rumah tangga. Akses kaum perempuan untuk bekerja juga berarti adanya kesempatan untuk bisa terlibat dalam hubungan sosial-politik yang lebih luas. Ini berarti kaum perempuan bisa berkontribusi dalam pembangunan di lingkungannya karena ia tidak lagi berkutut di ruang domestik tetapi juga memiliki waktu untuk berinteraksi dalam ranah publik terutama melalui cara terlibat dalam organisasi. Dengan begitu, keterlibatan kaum perempuan dalam organisasi memiliki makna yang luas, tidak sekedar keuntungan sosial semata. Bisa dikatakan, ada transformasi dari modal sosial, berupa keterlibatan dalam berorganisasi, ke dalam modal ekonomi berupa adanya kesempatan untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi. Tetapi, upaya transformasi dari modal sosial ke modal ekonomi ini tidaklah mudah. Masih banyaknya cara pandang defisit dimana sumber daya perempuan dianggap tidak sepadan dengan laki-laki pada akhirnya membuat posisi perempuan dalam berinteraksi mencari sumber penghidupan menjadi terbatas. Karena itu, perlu cara pandang yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi setara

dan adil terutama dalam memperoleh, mendayagunakan dan mengembangkan aset dan akses sumber daya ekonomi, sosial dan politik. Sudah saatnya negara membuat kebijakan publik yang menempatkan kaum perempuan sebagai aktor utama dan tidak sekedar sebagai obyek atau pelengkap kebijakan. Secara ringkas, tulisan ini meyakini bahwa dengan berorganisasi, maka kaum perempuan memiliki peluang yang lebih besar untuk bisa terlibat dalam kegiatan ekonomi yang pada akhirnya bisa mengantarkan kaum perempuan pada gerbang kesejahteraan.

Kata Kunci: Organisasi Perempuan, Desa, Kesejahteraan dan Aktivitas Ekonomi

## Pendahuluan

Kesempatan kerja bagi kaum perempuan di Indonesia tampaknya masih belum maksimal. Data Bappenas (2010) menunjukkan, *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)* perempuan sekitar 50%, sementara TPAK laki-laki pada periode yang sama rata-rata 84%. Data ini juga mengonfirmasi bahwa salah satu tujuan pembangunan global (*millenium development goals-MDGs*) yakni mempromosikan kesamaan gender termasuk dalam hal aktivitas ekonomi yang telah digaungkan sejak tahun 2000 belum tercapai dengan memuaskan padahal tenggat waktunya kian dekat yakni 2015. Dengan kata lain, kesempatan untuk memperoleh pekerjaan ternyata masih lebih banyak didominasi kaum laki-laki daripada perempuan. Dengan begitu, secara umum posisi perempuan dalam memperoleh lapangan kerja masih lemah.

Lemahnya posisi perempuan dalam mencari kerja atau terlibat dalam aktivitas perekonomian sebetulnya sebuah potret ironi. Betapa tidak? Sejak lama, Pemerintah mulai dari tingkat Pusat hingga kabupaten selalu mendengungkan adanya kebijakan pro-perempuan maupun anggaran responsif gender. Pada tahun 2000, muncul Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang *Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional* dimana salah satu instruksinya adalah meminta Menteri Pemberdayaan Perempuan untuk memberikan bantuan teknis kepada instansi dan lembaga pemerintahan di tingkat Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender. Ada pula Kepmendagri No 132/2003 yang telah diperbaharui dengan Permendagri No. 15/2008 tentang *Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah*.

Mengacu pada regulasi tersebut, kebijakan pembangunan di Pusat maupun Daerah harus mencerminkan kesetaraan gender dimana dalam Permendagri tersebut<sup>1</sup> disebutkan perlunya kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Sayangnya, berpijak pada data Bappenas di atas, dukungan kebijakan tersebut tampaknya belum bersambut dengan adanya fakta keterlibatan perempuan dalam ranah publik terutama dalam hal kesempatan bekerja. Artinya, ada permasalahan antara regulasi dengan pilihan kebijakan yang dijalankan para pemimpin di eksekutif baik di level Pusat maupun di Daerah.

Data *Gender Inequality Index* (GII) cukup menarik untuk melihat potret perempuan Indonesia terkini. GII ini merefleksikan ketidakseimbangan berbasis gender pada tiga dimensi yakni kesehatan reproduksi (diukur dari kematian ibu dan tingkat kesuburan remaja), pemberdayaan (diukur dari pembagian kursi parlemen dan capaian tingkat pendidikan level menengah dan atas) dan aktivitas ekonomi (diukur dari tingkat partisipasi angkatan kerja). Data GII tahun 2012 memperlihatkan nilai Indonesia sebesar 0,494 sehingga berada pada ranking 106 dari 148 negara. Bandingkan dengan Filipina yang ada di ranking 77 maupun Cina yang berada pada ranking 35.<sup>2</sup>

Tabel 1. Kondisi GII Indonesia pada Tahun 2012 dan Perbandingannya dengan Filipina dan Cina

	GII value	GII rank	Maternal mortality ratio	Adolescent fertility rate	Female seats in parliament (%)	Population with at least secondary education		Labour force participation rate (%)	
						Female	Male	Female	Male
Indonesia	0,494	106	220	42,3	18,2	36,2	46,8	51,2	84,2
Philippines	0,418	77	99	46,5	22,1	65,9	63,7	49,7	79,4
China	0,213	35	37	9,1	21,3	54,8	70,4	67,7	80,1
Medium HDI	0,457	-	121	44,7	18,2	42,1	58,8	50,5	79,9

Sumber: Human Development Report (2013)

Data GII ini, terutama pada aspek keterlibatan angkatan kerja perempuan, semakin menegaskan data Bappenas sebagaimana

1 Bab 1, Pasal 1, Ayat 3

2 Human Development Report, 2013

disampaikan di atas. Artinya, paling tidak dalam dua tahun terakhir, belum ada kebijakan Pemerintah Pusat yang mampu mendorong atau meningkatkan keterlibatan perempuan ke dalam angkatan kerja. Ini juga membuktikan bahwa kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam Instruksi Presiden maupun peraturan menteri belum mampu mendorong atau menciptakan program yang konkrit guna meningkatkan keterlibatan perempuan dalam memperoleh pekerjaan atau terlibat dalam sebuah aktivitas ekonomi yang bisa menjadi sumber penghidupan. Secara umum bisa dikatakan, jika para perempuan yang belum bekerja atau terlibat dalam kegiatan ekonomi hanya menunggu datangnya kebijakan dari Pemerintah Pusat, maka bisa dipastikan hal ini terlalu lama dan tidak ada yang bisa memastikan.

Susahnya kaum perempuan mendapatkan pekerjaan menginspirasi beberapa aktivis perempuan di beberapa wilayah Indonesia, misalnya di Kab. Takalar, Kab. Lombok Tengah maupun Kab. Buton Utara mencari jalan keluar. Di Kab. Lombok Tengah-Provinsi Nusa Tenggara Barat, misalnya, perempuan dan kelompok perempuan berupaya keluar dari kemiskinan dengan cara berorganisasi sendiri menciptakan lapangan pekerjaan untuk mengatasi problem domestiknya. Hal ini sekaligus mengatasi permasalahan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja atau sumber penghidupan baru bagi keluarga di luar pendapatan dari suami.

Tulisan ini akan fokus pada beberapa pertanyaan. Bagaimana perempuan membuat dan mengembangkan sumber penghidupan sebagai upaya keluar dari kemiskinan? Bagaimana perempuan memanfaatkan dan mendayagunakan aset yang ada di lingkungannya untuk bisa menopang kegiatan ekonomi? Bagaimana pula perempuan mentransformasi modal sosial menjadi modal ekonomi?

### **Feminisasi Kemiskinan**

Pada periode 1970-an, Diana Pearce (1978) pernah mengajukan konsep tentang feminisasi kemiskinan dalam tulisannya berjudul *"The Feminization of Poverty: Women, Work and Welfare"*. Feminisasi kemiskinan merujuk pada adanya kenyataan sebagian besar warga miskin berjenis kelamin perempuan. Dalam pandangan Diana, salah satu faktor utama kemiskinan yang menimpa kaum perempuan adalah karena terpisahnya mereka dari suami atau pasangannya, entah karena faktor kematian, tetapi yang seringkali terjadi adalah karena sebab perceraian. Ada dua dampak yang mungkin muncul dengan faktor ini. Di satu sisi,

perempuan tersebut mendapat “kebebasan” untuk memilih lapangan kerja. Tetapi di sisi lain, kemungkinan terbesar adalah terjadinya pemiskinan (*pauperization*) dan ketergantungan dalam memperoleh kesejahteraan. Diana meyakini, proporsi terbesar masyarakat yang tidak beruntung secara ekonomi adalah kaum perempuan. Keyakinan ini tampaknya selaras dengan data Bappenas (2010) di atas yang melansir masih minimnya angkatan kerja kaum perempuan dibanding kaum laki-laki.

Hal ini tidaklah berlebihan mengingat masih adanya pandangan bias gender yang menganggap posisi perempuan terbatas dalam ranah domestik maupun sebagai aspek sekunder dalam proses sebuah pekerjaan. Diana (1978) melihat bahwa dampak dari segregasi pekerjaan dan upah rendah terhadap kaum perempuan menjadi salah satu sebab utama ketidakberuntungan kaum perempuan dalam ekonomi. Upah rendah sering terjadi terhadap kaum perempuan karena biasanya, seorang perempuan hanya bisa bekerja paruh waktu (*part time*). Ini terutama terjadi pada perempuan dengan status kepala rumah tangga yang curahan waktunya tidak bisa sepenuhnya untuk bekerja karena harus membagi waktu untuk keluarga dan anak-anaknya. Setali tiga uang, banyak pula kebijakan Pemerintah yang menempatkan perempuan sebagai obyek dan pelengkap kebijakan. Belum banyak kebijakan yang memosisikan perempuan sebagai garda depan atau aktor strategis dalam sebuah kebijakan publik. Tidak mengherankan karena cara pandang terhadap perempuan memosisikan mereka pada sisi kekurangannya, bukan aset yang dimilikinya.

Studi yang dilakukan Ester Boserup berjudul “*Women’s Role in Economic Development*” pada tahun 1970 merupakan salah satu kajian awal yang mencoba menganalisis proses pembangunan yang memberi dampak secara berbeda terhadap laki-laki maupun perempuan hingga muncul sebuah pendekatan yang lazim disebut dengan *women in development* (WID). Pendekatan ini memiliki asumsi bahwa marginalisasi perempuan terjadi karena akses yang tidak sama terhadap pembangunan, sumber tenaga kerja dan perkembangan ekonomi dalam sektor kehidupan modern. Dalam perkembangannya, pendekatan WID ini menginspirasi program pembangunan yang bertujuan untuk mengintegrasikan kaum perempuan ke dalam proses pembangunan, khususnya ke dalam angkatan kerja baik melalui pendidikan maupun pelatihan. Pada medio 1980-an, pendekatan WID ini bertransformasi ke dalam pendekatan *gender and development* (GAD) yang mengakui

bahwa “perempuan” adalah bagian dari konstruksi sosial dalam sebuah sistem gender.

Persoalan kemiskinan yang dihadapi perempuan sejatinya tidak sama dengan laki-laki. Dalam konteks tersebut, Diana Pearce (1978) mengeksplorasi dua aspek yakni adanya perbedaan dalam sumber pendapatan yang mungkin menjadi penyebab kemiskinan perempuan dan sistem jaminan kesejahteraan terutama bagi perempuan miskin. Selain itu, permasalahan lain yang dijelaskan Diana adalah soal rasisme dan praduga negatif terutama terhadap perempuan minoritas. Faktor rasis membuat proses pembangunan berlangsung secara eksklusif dan tidak mendatangkan manfaat bagi semua pihak terutama kepada kaum perempuan yang berasal dari kalangan minoritas. Akhirnya, kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi menjadi tidak maksimal.

Tidak mengherankan pula jika Fukuda Parr (1999) menyerukan bahwa perempuan lebih miskin daripada laki-laki. Dengan kata lain, kemiskinan diyakini memiliki dimensi perempuan. Di banyak masyarakat di dunia, perempuan memang menghadapi keterbatasan pilihan dan kesempatan dibanding laki-laki yang pada akhirnya menyebabkan keterbatasan dalam keterlibatan proses pembuatan kebijakan publik, akses dalam pekerjaan bahkan dalam menjalani kehidupan secara kreatif. Paling tidak ada dua madzhab pemikiran dalam wacana feminisasi kemiskinan dalam Thibos, Loucks dan Martin (2007) dan Pressman (2003). *Pertama*, adanya perubahan struktur dalam keluarga dimana perempuan menjadi kepala keluarga. *Kedua*, perubahan struktur dalam aktivitas ekonomi telah menyebabkan pergeseran kelompok perempuan ke dalam beberapa jenis pekerjaan khusus, adanya upah rendah serta rendahnya kesempatan kerja.

Selain itu, kemiskinan yang terjadi pada kaum perempuan juga rentan berdampak pada kemiskinan terhadap anak-anak. Ini terutama untuk kasus perempuan yang menjadi kepala rumah tangga. Hal ini sangat masuk akal mengingat keterbatasan perempuan dalam memenuhi kebutuhan standar hidup keluarganya terutama anak-anaknya. Karena itu, cakupan wacana feminisasi kemiskinan sebetulnya tidak hanya mengenai perempuan tetapi juga terhadap keluarga khususnya anak-anak. Tidak adanya kemampuan untuk menjaga anak-anak dari ancaman kemiskinan pada akhirnya akan menyebabkan “kemiskinan warisan” yakni suatu kondisi dimana anak-anak tidak memiliki kondisi hidup yang layak karena disebabkan oleh kondisi orang tuanya yang hidup di bawah standar kelayakan.

Dalam konteks kemiskinan berwajah perempuan tersebut, penting ditekankan bahwa penyebab kemiskinan tidak semata-mata hanya persoalan minimnya pendapatan karena bisa mengaburkan persoalan mendasar dari kemiskinan yang dialami perempuan. Lebih dari itu, perlu dipertegas dengan cara pandang *human poverty* atau kemiskinan kemanusiaan yang melihat penyebab kemiskinan secara multidimensi. Dalam perspektif kemiskinan kemanusiaan, penyebab kemiskinan ditengarai oleh minimnya kesempatan dan pilihan terhadap kebutuhan dasar hidup, misalnya kesempatan untuk hidup sehat, menikmati standar hidup yang layak, adanya rasa percaya diri, memiliki kehormatan dan memperoleh rasa hormat dari orang lain hingga keterbatasan untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan terutama yang menyangkut kehidupan perempuan miskin<sup>3</sup>

Salah satu cara bagi kaum perempuan untuk bisa terlibat dalam kegiatan sosial maupun dalam proses pengambilan kebijakan di lingkungannya adalah dengan terlibat dalam sebuah organisasi. Organisasi sendiri bisa diartikan sebagai sebuah kelompok dengan sistem keanggotaan yang dapat diidentifikasi serta terlibat dalam aksi kolektif untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki para anggotanya (Giddens, 2006: 637). Keterlibatan perempuan dalam sebuah organisasi tidak saja memberi ruang bagi perempuan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari tetapi juga memberi kesempatan bagi perempuan untuk mengungkapkan permasalahan yang dihadapi ke dalam sebuah forum. Dengan begitu, organisasi bisa menjadi alat atau instrumen bagi perempuan untuk memberdayakan dirinya sendiri sekaligus menjadi arena untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi.

### **Pengalaman Beberapa Desa**

Di tengah maraknya orang mencari sumber penghidupan, praktik yang dilakukan perempuan dan kelompok perempuan di Indonesia Timur misalnya di Kab. Takalar, Kab. Lombok Tengah dan Kab. Buton Utara tampaknya menarik perhatian. Studi IRE-ACCESS di desa Soreang - Kab. Takalar-Sulawesi Selatan (2012) menunjukkan bahwa perempuan petani garam desa Soreang mampu tampil progresif dalam aktivitas ekonomi sebagai upaya menggapai kesejahteraan. Desa Soreang adalah tipe desa pesisir yang merupakan hasil pemekaran dari desa Patani. Kelompok nelayan di desa yang memiliki 360 KK atau 1304 jiwa

---

<sup>3</sup> Human Development Report, 1997 dalam Fukuda Parr, 1999, Thibos, Loucks dan Martin, 2007



tersebut tidak saja kesulitan dalam mengakses program pembangunan tetapi juga dalam hal mengakses sumber keuangan. Berdasarkan data RPJMDes desa Soreang (2011) jumlah penduduk miskin dan sangat miskin mencapai sekitar 60%. Dengan tipologi desa pesisir, tentu saja sumber utama di desa adalah area pantai.

Sejak awal pembahasan RPJMDes di desa Soreang, komoditas garam merupakan salah satu yang paling memenuhi kriteria untuk dapat dijadikan sebagai produk unggulan desa. Hal ini secara tidak langsung memberi isyarat bahwa masyarakat yang bekerja di sektor garam mendapat prioritas perlindungan ekonomi. Salah satu masalah utama yang dihadapi kelompok nelayan, khususnya petani garam di desa Soreang adalah adanya sekelompok orang dengan modal besar yang mencoba meraih keuntungan lebih besar daripada petani garam di desa Soreang. Hutang dan ketidakmampuan mengakses modal membuat kehidupan petani garam seolah tak kunjung menggapai kesejahteraan. Dengan model sistem ekonomi rente, para petani garam selalu dalam posisi buntung karena keuntungan terbesar justru beralih ke para tengkulak atau rentenir. Ini karena petani garam harus mengangsur hutang mereka kepada para tengkulak.

Masalah klasik di desa Soreang tersebut coba diatasi dengan cara menumbuhkan modal sosial berupa solidaritas sosial. Tetapi modal sosial saja tidak cukup. Tanpa adanya sebuah wadah yang terstruktur, maka solidaritas sosial hanya bersifat sementara saja dan tidak memiliki efek yang signifikan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Karena itu, para petani garam termasuk kaum perempuan mendirikan kelompok usaha produktif (KUP) *Abbulosibatang* yang awalnya berjumlah 29 orang (22 perempuan dan 7 laki-laki). Sebagai langkah awal, KUP ini memberlakukan kebijakan simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Akhirnya, terkumpul dana awal sebesar Rp. 440.000,-. Setelah diputar melalui sistem simpan pinjam, dalam kurun waktu 15 bulan, KUP *Abbulosibatang* sudah memiliki aset sebesar Rp. 6.508.000,-.

Sejauh ini, kehadiran KUP *Abbulosibatang* memberi dampak signifikan. *Pertama*, dengan berorganisasi, yakni terlibat dalam KUP *Abbulosibatang*, kaum perempuan telah membuktikan diri mampu menciptakan dan menumbuhkan sumber penghidupan dengan menjadi petani garam. Kaum perempuan tidak lagi diposisikan dalam ruang domestik tetapi juga terlibat dalam ruang publik yang dibuktikan dengan adanya kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan

untuk menduduki posisi ketua KUP. *Kedua*, KUP Abbulosibatang ini juga mampu mengembangkan jaringan dengan pihak swasta, misalnya dengan PT Aneka Sari. Adanya jaringan ini merupakan salah satu strategi penghidupan berkelanjutan bagi KUP Abbulosibatang termasuk perempuan petani garam didalamnya.

Pada kasus yang lain, studi IRE-ACCESS di Lombok Tengah (2012) menunjukkan bahwa para perempuan usaha kecil berusaha mengorganisir diri melalui Jaringan Perempuan Usaha Kecil (JARPUK) yang mampu berkontribusi dalam memerangi kemiskinan yang melingkupinya. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk di Lombok Tengah mencapai 860.209 terdiri dari 407.709 laki-laki dan 453.130 perempuan. Berdasarkan data tahun 2009, tingkat kemiskinan mencapai 20,94 dengan indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 60,26. Artinya, sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang menjadi indikator IPM belum dapat diatasi pemerintah daerah secara optimal.

Dalam konteks perempuan dan kemiskinan, Kab. Lombok Tengah menghadapi permasalahan yang cukup pelik. Laki-laki dan perempuan memiliki peran dan tanggung jawab berbeda dalam level keluarga dan masyarakat. Akibatnya, permasalahan kemiskinan yang dihadapi perempuan menjadi tidak sama terutama dalam hal terbatasnya akses perempuan dalam pengambilan keputusan di level keluarga dan masyarakat, kesenjangan keterlibatan perempuan dalam sektor politik karena ketimpangan struktur sosial-kultural, rendahnya kualitas hidup perempuan dan tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak. (Mariana dan Eko, 2012: Hal. 11)

Adanya permasalahan yang melingkupi kelompok perempuan membuat para perempuan usaha kecil mengorganisir diri dalam sebuah jaringan yang menjadi cikal bakal organisasi. Jaringan ini bermula dari sebuah pertemuan 30 orang perempuan di BLK Tampar-ampar. Pada saat itu diberi nama JARPUK (Jaringan Perempuan Usaha Kecil) "Rindang" yang resmi berdiri pada 29 September 2001 difasilitasi oleh Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK). Pada tahun 2012 ini, jumlah PUK mencapai 2069 dan Kelompok Perempuan Usaha Kecil (KPUK) tercatat 164. Keberadaan KPUK ini sendiri mampu memotong mata rantai rentenir (masyarakat lokal menyebutnya *bank deok/bank subuh*) yang selama ini menjadi masalah klasik bagi para pegiat ekonomi di desa. Dengan manajemen sederhana, KPUK berupaya memotong mata rantai rentenir lokal dengan cara tidak mematok syarat yang ketat dan rumit bagi perempuan yang ingin beraktivitas di sektor ekonomi.

Bahkan, perempuan yang belum punya unit usaha, asalkan memiliki niat dan keinginan untuk menciptakan sumber penghidupan akan dibantu KPUK. Tidak kalah pentingnya, KPUK memberi pendidikan dan keterampilan terlebih dulu kepada anggota kelompoknya yang hendak membuka usaha sehingga anggotanya memiliki kemampuan untuk mengelola modal dari KPUK.

Menariknya, kisah sukses ini sebetulnya buah dari persenyawaan (*engagement*) antara ASPPUK, pemerintah daerah, PUK dan KPUK. Keterlibatan para pihak tersebut menjadi sebuah proses yang menyemaikan modal politik yang dipadu dengan modal sosial yang telah bertransformasi menjadi modal ekonomi. Berbagai bentuk pengakuan dan fasilitasi Pemda misalnya terlihat dalam Alokasi Dana Desa (ADD) untuk kelompok perempuan di beberapa desa, dukungan dana hibah melalui Dinas Sosial, serta adanya Instruksi Bupati No. 06/2011 tentang penggunaan kain tenun kedogan bagi PNS di lingkungan Pemda Lombok Tengah yang pengadaannya melalui PUK. Adanya dukungan ini jelas memberi kesempatan kaum perempuan untuk mengembangkan, mempertahankan dan mengelola sumber penghidupannya secara berkelanjutan.

Kehadiran Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) maupun Perempuan Usaha Kecil (PUK) di Lombok Tengah dapat dipahami sebagai bentuk transformasi dari modal sosial menjadi modal politik dan modal ekonomi. Di daerah tersebut, perempuan dan organisasi perempuan mengorganisir diri melalui jaringan ekonomi berbasis perempuan usaha kecil guna melawan jaringan pasar yang menutup akses perempuan. Pilihan untuk melakukan pengorganisasian diri ini merupakan bentuk aksi kolektif di sektor ekonomi dimana modal sosial mengalami pendalaman makna menjadi jaringan sosial dan aksi kolektif yang berorientasi pada pengembangan ekonomi rasional.

Sementara studi IRE-ACCESS di Desa Wa Ode Angkalo-Kabupaten Buton Utara (2012) menunjukkan, para perempuan yang tergabung dalam majlis taklim (perkumpulan warga berbasis keagamaan) mampu mengembangkan kegiatan menabung hingga akhirnya teretus ide mendirikan Lembaga Ekonomi Perempuan (LEP). Awalnya, LEP yang diberi nama "Amanah" ini hanya beranggotakan 7 orang, sekarang sudah mencapai 35 orang. Setiap anggota dikenai kewajiban untuk menyetorkan dana simpanan pokok sebesar 50 ribu dan simpanan wajib sebesar 10 ribu/bulan. Pada tahun 2012 yakni ketika riset ini dilakukan, dana yang sudah terkumpul sebanyak Rp. 41.050.000. Sedangkan dana

yang berputar sebanyak 25 juta. Seorang anggota bisa meminjam dana di LEP sebesar 5 kali dana yang disimpan. Jadi, kalau seorang anggota memiliki simpanan Rp. 1 juta, maka dia bisa meminjam Rp. 5 juta. Besar bunga pinjaman yang dibebankan kepada mereka yang meminjam sebesar 1% per bulan sedangkan mereka yang menyimpan dananya di LEP akan mendapatkan bunga simpanan sebesar 0,2% per bulan. Selain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dana pinjaman ini biasanya dipakai untuk kegiatan ekonomi produktif misalnya menambah modal usaha toko, kios maupun pertukangan.

Sejauh ini, keberadaan LEP ini mampu menjadi strategi untuk menjaga atau mempertahankan aset yang ada. Betapa tidak, pada situasi dimana hasil panen padi tidak bisa diharapkan karena gagal tanam atau gagal panen, uang pinjaman bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi warga lokal, situasi gagal panen merupakan ancaman yang tidak bisa diprediksi. Secara tidak langsung, ancaman gagal panen memungkinkan suatu keluarga, terutama perempuan kepala keluarga bisa jatuh miskin. Karena itu, LEP ini adalah ikhtiar para perempuan agar bisa tetap berdaya. LEP ini merupakan bukti bagaimana ide kaum perempuan bisa berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan sekaligus menjaga keberlangsungan aset lokal sebagai bagian dari strategi penghidupan di masa mendatang. LEP ini juga kelembagaan desa yang tumbuh dari tradisi masyarakat sipil di desa yang pada akhirnya mampu menarik perhatian para pemangku kebijakan di level supra desa.

## Penutup

Berdasarkan data di tiga wilayah desa di atas, terlihat bahwa perempuan mampu keluar dari jeratan kemiskinan dengan cara berorganisasi dan mendayagunakan aset di sekitarnya. Cara ini dapat menjamin dan mengembangkan *livelihood* kelompok perempuan secara jangka panjang. Ada beberapa rekomendasi kebijakan yang hendak diajukan;

*Pertama*, organisasi perempuan menjadi kunci bagi penguatan perempuan. Melalui organisasi, perempuan dapat memikirkan dan memecahkan masalah mereka secara bersama-sama. Organisasi ini menjadi momentum perempuan untuk tidak lagi terkungkung di wilayah domestik. Ini sekaligus membalikkan pandangan mayoritas yang menyebut bahwa perempuan cuma bisa berperan dalam sektor domestik. Melalui peran di organisasi ini pula, pandangan politik yang secara tradisional selalu menempatkan arena publik sebagai wilayah

laki-laki dapat dipertanyakan atau dikaji ulang. Selain itu, perempuan perlu terlibat dalam proses tata kelola (*governance*) yang lebih luas sehingga ada *alternative income* bagi keluarga terutama ketika laki-laki sebagai kepala keluarga tidak bisa mencukupi nafkah secara maksimal dan optimal untuk kebutuhan keluarga.

Tidak hanya itu, perluasan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan juga berarti mendorong adanya persamaan gender di ranah publik sebagaimana target MDG's. Dengan begitu, Pemerintah perlu memperluas keterlibatan perempuan dalam proses kebijakan publik dan tidak hanya menjadikan perempuan sebagai sasaran atau obyek sebuah program atau kebijakan. *Kedua*, Pemerintah perlu meningkatkan fasilitasi dan dukungannya terhadap organisasi perempuan misalnya KPUK atau JARPUK yang telah tumbuh berkembang berkat adanya transformasi gerakan dari modal sosial ke modal ekonomi. Aksi kolektif yang diinisiasi perempuan desa di sektor ekonomi akan berdampak luas ketika pemerintah merekognisi dan memfasilitasi lebih optimal sebagaimana yang ditunjukkan Pemda Lombok Tengah yang menerbitkan Instruksi Bupati dimana PNS di lingkungannya diharuskan memakai kain tenun lokal yang pengadaannya berasal dari usaha ekonomi perempuan di Lombok Tengah.

*Ketiga*, praktik perempuan dan organisasi perempuan dalam mengembangkan berbagai jenis sumber penghidupan sebagai upaya keluar dari kemiskinan bisa menjadi inspirasi bagi gerakan memperkuat peran perempuan di desa. Dengan adanya organisasi, maka kaum perempuan diharapkan memiliki ruang untuk identifikasi bersama pemecahan masalah kemiskinan berdasarkan potensi atau aset yang dimiliki atau yang berada di lingkungannya.

### Sumber Bacaan

- Alisjahbana, Armida S. dkk. (2010), Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia tahun 2010, Jakarta, Bappenas.
- Dwipayana, Ari, AAGN (Ed.) (2013), *Mutiara Perubahan: Inovasi dan Emansipasi Desa dari Indonesia Timur*, Yogyakarta, Diterbitkan atas kerjasama IRE dengan ACCESS Tahap II.
- Fukuda Parr, Sakiko, (1999), "What Does Feminization of Poverty Mean? It Isn't Just Lack of Income," *Feminist Economics*, Hal. 99-103.
- Ford, Michele dan Parker, Lyn (Ed.), (2008), "Introduction: Thinking about Indonesian Women and Work," dalam *Women and Work in Indonesia*, Routledge, New York

- Giddens, Anthony. (2006), *Sociology*, Cet. Kelima, Polity Press, Cambridge, United Kingdom
- Human Development Report, 2013
- Haryanto, Titok, (2012), "Warga Bergerak Melawan Kemiskinan: Pelajaran Berharga dari Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara," Stock Take; Manfaat program ACCESS Terhadap Kemandirian Desa dan Penanggulangan Kemiskinan. IRE bekerjasama dengan ACCESS Tahap II.
- Institute for Research and Empowerment (IRE), (2013), "Emansipasi Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan," *Policy Paper* yang diterbitkan oleh IRE dengan dukungan Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Phase II-AusAID.
- Mariana, Dina dan Eko, Sutoro, (2012), "Memanfaatkan Modal Sosial Menjadi Modal Ekonomi: Pelajaran Berharga dari Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat," Stock Take; Manfaat program ACCESS Terhadap Kemandirian Desa dan Penanggulangan Kemiskinan. IRE bekerjasama dengan ACCESS Tahap II.
- Pressman, Steven (2003), "Feminist Explanations for the Feminization of Poverty," Working Paper No. 351, February, 2003, Luxembourg Income Study.
- Pearce, Diana, (1978), "The Feminization of Poverty: Women, Work, and Welfare," *The Urban and Social Change Review*, Special Issue on Women and Work, Vol. 11 Numbers 1 and 2.
- Qomariyah, Puji dan Kurniawan, Borni, (2012), "Perempuan Soreang Melawan Rejim Pasar Uang: Pelajaran Berharga dari Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan," Stock Take; Manfaat program ACCESS Terhadap Kemandirian Desa dan Penanggulangan Kemiskinan. IRE bekerjasama dengan ACCESS Tahap II.
- Starrels, E. Marjorie, Bould, Sally dan Nicholas, J. Leon, (1994), "The Feminization of Poverty in the United States: Gender, Race Ethnicity and Family Factors," *Journal of Family Issues*, Vol. 15 No. 4, December, Hal. 590-607.
- Thibos, Megan, Lavin Loucks, Danielle dan Martin, Marcus, (2007), "The Feminization of Poverty," Laporan untuk Joint Policy Forum tentang *The Feminization of Poverty* yang disponsori oleh William Institute dan The YMCA, Amerika Serikat pada 7 Mei 2007.
- United Nations Development Programme, (1997), "Human Development Report," New York, Oxford University Press.